

**“EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
TERHADAP KEJAHATAN KDRT DI MAKASSAR”**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
(UIN) Alauddin Makassar

Oleh :

HASRIANA
NIM.10500113002

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasriana
Nim :10500113002
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 2 Mei 1995
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : BTN Mega Resky, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba
Opu, Kabupaten Gowa
Judul : Eksistensi lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK)
terhadap kejahatan KDRT Di Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Juli 2017

Penyusun,

Hasriana

NIM : 10500113002

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji Penulisan skripsi saudara **Hasriana**, NIM. **10500113002**, Mahasiswa program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Terhadap Kejahatan KDRT di Makassar**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Samata, 7 Juni 2017

Penguji I



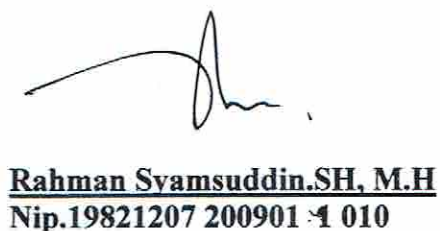
Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H
NIP. 19740214 200801 1 009

Penguji II



St. Nurjannah, SH, M.H
NIP. 1976082220003122003

Pembimbing I



Rahman Syamsuddin, SH, M.H
Nip. 19821207 200901 1 010

Pembimbing II








Dr. Hamzah Hasan, M.Hi
Nip. 196312131 199302 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) TERHADAP KEJAHATAN KDRT DI MAKASSAR", yang disusun oleh Hasriana, NIM: 10500113002, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar.

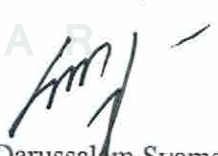

Makassar, 10 Juli 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (.....) 
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H (.....) 
Munaqisy I : Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H (.....) 
Munaqisy II : St. Nurjannah, SH, M.H (.....) 
Pembimbing I : Rahman Syamsuddin, SH, M.H (.....) 
Pembimbing II : Dr. Hamzah Hasan, M.Hi (.....) 

UNIVERSITA DITAKUTAI OLEH

Dekan Fakultas Syariah & Hukum,
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003 

**LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI**

**“TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN TERHADAP
PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN”**

Disusun dan diajukan Oleh

Hasriana

NIM: 10500113002

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan
Penulisan skripsi

Pada tanggal : 15 Desember 2016

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I



Rahman Syamsuddin, SH, M.H
19821207 200901 1 010

Pembimbing II



Drs. Hamzah Hasan, M.Hi
196312131 199302 1 003

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Istiqamah, SH., M.H
NIP. 19610404 199303 1 005

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 195704141986031003

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “Eksistensi lembaga perlindungan saksi dan korban(LPSK) terhadap kejahatan KDRT ”dapat diselesaikan dengan baik.

Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai *rahmatan li al-'alamin* yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar ilahi.

Saya sangat meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang saya miliki, tapi karena dukungan dan bimbingan serta doa dari orang-orang sekeliling saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya berikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Istiqamah S.H.,M.H selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Rahman Syamsuddin,S.H.,M.H.dan Bapak Drs.Hamzah Hasan,M.Hi

selaku pembimbing yang senantiasa membimbing ananda dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Kepala Staf Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih untuk seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kedua orang tua tercinta, ayah dan ibu yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang luar biasa besarnya kepada penyusun. Serta keluarga besarku yang ada di Kabupaten Sinjai yang selalu memberikan dukungan yang terbaik.
8. Keluarga besar Ilmu Hukum A Angkatan 2013, Saudara-saudara seperjuangan, Terima kasih untuk kalian semua, kalian saudara yang hebat dan luar biasa.
9. Keluarga KKN-R Angkatan 53 kecamatan Tinggimoncong Kelurahan Malino, Lingkungan Batulapisi Dalam yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Makassar, 10 Juli 2017

Penyusun,

Hasriana

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1-8
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9-25
A. Pengertian tindak pidana.....	9
B. Tindak pidana KDRT.....	10
C. Jenis-jenis KDRT.....	17
D. Ruang lingkup KDRT.....	23
E. Hak-hak korban KDRT.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26-27
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	26
B. Metode Pendekatan	26
C. Sumber Data.....	26

D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28-55
A. Profil lembaga perlindungan saksi dan korban.....	28
B. Bagaimana hak peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kejahatan KDRT.....	33
C. Bagaimana upaya yang ditempuh oleh LPSK dalam melindungi saksi dan Korban terhadap kejahatan KDRT.....	46
BAB V PENUTUP.....	57-58
A. Kesimpulan	57
B. Implikasi Penelitian.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

ABSTRAK

Nama : Hasriana
Nim : 10500113002
Judul : Eksistensi lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) terhadap kejahatan KDRT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Perlindungan Hukum yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi Saksi Korban KDRT dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban dalam upaya perlindungan hukum terhadap saksi korban kejahatan KDRT.

Penelitian ini dilakukan wilayah Makassar tepatnya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan menggunakan teknik wawancara dengan beberapa pejabat instansi lembaga tersebut untuk menjadi narasumber, dan studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data, yaitu, upaya Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban dengan kejahatan KDRT sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UU PSK mengenai hak korban KDRT. Sebab perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan oleh aparat penegak hukum dan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh korban. UU LPSK tidak menetapkan mengenai berbagai ketentuan yang seharusnya disepakati oleh LPSK dengan saksi atau korban agar dapat berjalan beriringan kemudian dalam UU LPSK juga tidak diatur tentang cara Penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. LPSK juga tidak dapat turun langsung dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi korban sebagai bentuk dari tindak pidana KDRT jika saksi korban itu sendiri tidak melakukan inisiatif pelaporan kepada pihak kepolisian atau LPSK.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dewasa ini korban kejahatan semakin bertambah seiring dengan berkembangnya zaman. Dalam membuktikan suatu kejahatan maka keterangan saksi yang sebenar-benarnya tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun sangat dibutuhkan untuk memperjelas suatu tindakan kriminal. Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.

Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil. Begitu banyak kasus tindak pidana yang tidak terungkap dengan berbagai alasan seperti tidak adanya saksi, saksi ataupun korban yang mengurungkan niatnya untuk memberikan kesaksian karena takut akan keselamatan dirinya ataupun keluarganya, saksi pelapor yang justru menjadi tersangka dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik, bahkan yang lebih parah lagi adalah fakta tewasnya saksi sebelum persidangan kasus tindak pidana tersebut dimulai. Lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban

mengakibatkan semakin menjamurnya pelanggaran terhadap hukum di Indonesia. Sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban terasa sangat perlu untuk dilakukan.¹

Begitu pentingnya perlindungan saksi dan korban Jauh sebelum peraturan perundang-undangan lahir Hal ini diatur dalam Q.S At-Taubah/9:6 yang menegaskan

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ
أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ①

Terjemahnya :

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyirikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.....(Q.S At-taubah/9:6)”²

Adapun tafsir dari ayat ini menurut Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yakni dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu, yakni diantara orang-orang yang akan perintahkan kamu untuk memerangi mereka dan Aku halalkan kepadamu jiwa dan harta benda mereka. Ayat ini memiliki relevansi karena adanya perlindungan saksi dan korban untuk meminta keamanan kepada pihak yang berwenang, dan meminta perlindungan kepadamu maksudnya, meminta keamanan kepadamu, maka perkenalkanlah permintannya hingga ia sempat

¹Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta : Pressindo 1983) h.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dan Tafsir perkata*, (Bandung:Jabal,2010),h.187

mendengar *kalamullah*, yakni Al-Qur-an yang engkau bacakan kepadanya dan kamu ingatkan dia tentang sesuatu dari perkara agama yang menegakkan hujah Allah atas dirinya, *Kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya* Artinya, antarkanlah dia sampai ke tempat yang aman hingga ia dapat kembali ketanah airnya dan dapat pulang kerumahnya penuh rasa aman, *Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui* Artinya, sesungguhnya kami syariatkan memberikan keamanan kepada mereka agar mereka mengetahui agama Allah dan agar seruan Allah tersebar di kalangan semua hamba-Nya.³

Kemudian setelah lahirnya peraturan perundang undangan perlindungan terhadap saksi dan korban diatur secara umum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf g konstitusi kita juga telah mengamanatkan pentingnya perlindungan saksi dan korban ini seperti ini di jelaskan sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, bab1 Pasal 6.

Adapun maksud dari Undang-Undang di atas kaitannya dengan Perlindungan saksi dan korban bahwa setiap orang mempunyai hak asasi untuk mendapatkan perlindungan,terlebih lagi untuk seorang saksi sebagai kunci terungkapnya kebenaran dari suatu kejahatan.

Namun pada kenyataannya masyarakat terkadang takut untuk menjadi seorang saksi dalam persidangan karena adanya intervensi atau tekanan dalam memberikan kesaksian. Seperti tekanan dari pihak lawan, hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemberian perlindungan kepada saksi.

B. *Rumusan masalah*

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diajukan pokok permasalahan yang dirumuskan penulis adalah “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Kejahatan KDRT di Makassar”. Dari pokok masalah tersebut penulis merumuskan sub permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kejahatan KDRT?
2. Bagaimana upaya yang ditempuh oleh LPSK dalam melindungi saksi dan Korban dari kejahatan KDRT?

C. *Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus*

1. Fokus penelitian

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi

yakni: Eksistensi LPSK dalam perlindungan hukum saksi dan korban terhadap kejahatan penganiayaan.

Berdasar asas persamaan didepan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.

2. Deskripsi fokus

Orientasi penelitian ini dibatasi pada hak-hak Saksi dan korban kejahatan KDRT pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Makassar. adapun hal yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Hak Peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melakukan Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan KDRT karena banyaknya saksi yang tidak melaporkan dirinya ke LPSK dan takut untuk bersaksi.

D. *Kajian pustaka*

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

Arif Gosita dalam bukunya Masalah korban kejahatan (kumpulan Karangan) menjelaskan tentang kedudukan korban didalam tindak pidana, peranan korban dalam interaksi sosial mempengaruhi terjadinya kejahatan dan pemenuhan kepentingan korban tindak pidana tanggung jawab bersama

kejahatan suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif dan pasif dalam suatu kejahatan

Mien Rukmini dalam bukunya Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai) menjelaskan tentang hukum di Indonesia kurang melindungi korban kedudukan sebagai korban, kita juga dapat melihat bahwa korban adalah sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita dalam bukunya menjelaskan bahwa perkembangan Kejahatan pada umumnya dan awal Kejahatan dan penanggulangannya merupakan perbuatan kriminal.

Maidin Gultom, dalam bukunya menjelaskan bahwa keluarga dan kekerasan sekilas seperti sebuah paradoks, kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya. Kerugian korban tindak kekerasan dalam keluarga tidak saja bersifat materil tetapi juga immateril antara lain berupa goncangan emosional dan psikologis yang langsung atau tidak langsung akan memengaruhi kehidupannya.

Moerti Soeroso dalam bukunya menjelaskan bahwa sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap

baru. Meskipun pada dasarnya bentuk bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan , perkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yan ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Hak KDRT
- b. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh dalam melindungi saksi dan korban KDRT.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis,yaitu :

1) Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dan memberikan wawasan yang lebih luas kepada para pembaca serta memberikan pengetahuan tambahan untuk mengembangkan penelitian yang lebih lanjut terkait dengan ilmu hukum pidana khususnya mengenai terhadap lembaga perlindungan korban kejahatan

- b. Diharapkan dapat memberikan telaah yang lebih lanjut terhadap kelebihan dan kekurangan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban

2) Manfaat Praktis

Diharapkan dapat berguna untuk memecahkan permasalahan-permasalahan konkrit terkait perlindungan korban kejahatan baik bagi lembaga perlindungan saksi dan korban yang di Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Pengertian Tindak Pidana*

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut :¹

1. Menurut Chairul Chuda, Tindak Pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.
2. Menurut Vos, Tindak Pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
3. Menurut Simons, Tindak Pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab²
4. Menurut Prodjodikoro, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana

¹.Rahman Syamsuddin,S, *Merajut Hukum Indonesia*,(Jakarta: Mitra Wacana Media,2014), h.193

². <http://www.PengertianTindakPidanaKDRT> hal.1-2 diakses pada tanggal 21 April 2017 pukul 22.15

5. Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsure dan sifat yang berkaitan, unsure-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungan dengan keadaan-keadaannya itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

B. Tindak Pidana KDRT

Dalam UU KDRT diatur mengenai pengenaan pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan melakukan KDRT yang tersebut dalam Pasal 5. Pasal 5 UU PKDRT menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan tindak pidana yaitu :³

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bab I, Pasal 1* .

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perbedaan nyata karena “kekerasan fisik” diberikan penafsiran otentik dalam pasal 6 UU PKDRT. Sedangkan dalam pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian dari “penganiayaan” tetapi hanya disebut kualifikasi deliknya yakni “penganiayaan”

Dalam yurisprudensi mengatakan “penganiayaan” adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka, dan dalam pasal 351 ayat (4) KUHP termasuk pula perbuatan berupa merusak kesehatan orang. Dengan adanya ketentuan pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, maka Undang-undang mensyaratkan selain sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, harus dipenuhi syarat lanjutnya yakni harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari untuk disebut “penganiayaan biasa”

Dengan melihat rumusan pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengenai ancaman terhadap larangan melakukan kekerasan fisik, maka tindak pidana KDRT dengan jenis kekerasan fisik ini terbagi dalam 4 (empat) bentuk yakni :

a. Kekerasan fisik biasa

Kontruksi kekerasan fisik dalam pasal 44 ayat (1) UU PKDRT adalah :

- 1) Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, maka syaratnya harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, rasa sakit itu harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
- 2) Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh bukan/selain oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya cukup hanya ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit.

b. Kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat

Dilihat dari rumusan pasal 44 ayat (2) UU PKDRT maka untuk terbuktinya pasal ini harus terpenuhi unsure-unsur :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1) ;
- 3) Dalam lingkup rumah tangga;
- 4) Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Perbuatan terlarang dalam pasal ini adalah melakukan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan orang dalam lingkup rumah tangga mendapat jatuh sakit (timbul gangguan atau fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia) atau luka berat (kualifikasinya dalam pasal 90 KUHP).

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan kekerasan fisik, meliputi :

- 1) Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

2) Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

3) Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004

Dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

4) Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004

Dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau hubungan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

Menurut pasal 51 uu No. 23 Tahun 2004 tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan .

2. Kekerasan Psikis

Dilihat dari rumusan pasal 45 ayat (2) UU PKDRT maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur :

- a. Suami atau istri;
- b. melakukan perbuatan kekerasan psikis terhadap suami atau istri;
- c. Yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian kegiatan sehari-hari.

Adapun Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan kekerasan psikis, meliputi :

- a. Pasal 45 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

- b. Pasal 45 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004

Dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menurut pasal 52 UU No. 23 Tahun 2004 tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan

3. Kekerasan seksual

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan kekerasan seksual, meliputi :

a. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

Menurut pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan

b. Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2004

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

c. Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2004

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan

akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

4. Kekerasan penelantaran rumah tangga

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan penelantaran rumah tangga, meliputi :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

Selain pidana sebagaimana dimaksud diatas Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawas lembaga tertentu (Pasal 50 UU No. 23 tahun 2004)

C. *Jenis-jenis KDRT*

Kekerasan yang paling menyedihkan apabila terjadi di dalam lembaga perkawinan, lembaga yang menurut pandangan bangsa Indonesia adalah menjadi tempat terjadinya kekerasan dan penyiksaan terhadap perempuan. Harus diakui, bahwa di dalam lembaga perkawinan banyak sekali terjadi kekerasan atau penyiksaan yang di alami istri yang tidak pernah dialami istri tetapi juga terjadi kekerasan psikis yang membuat istri sangat menderita.⁴

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara

1. *Kekerasan Fisik*

Tindak kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan antara lain tamparan, pemukulan,

⁴Abdul Rahman Kanang, *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*,(Alauddin University Press,Makassar:2012),h.36-43

penjambakan, mendorong secara kasar, menginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.

Kekerasan fisik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Pengertian dasar dari kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Perlukaan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-berulang dari yang ringan hingga yang fatal.⁵

Hukuman fisik pada perempuan memang umumnya tidak diterima dalam masyarakat sebagai tindakan mendidik untuk mengoreksi dan mengendalikan perilaku perempuan. Batasan identitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Akan tetapi, bila didapati beberapa luka memar lama atau baru, memar diwajah, hal ini menunjukkan adanya kekerasan akibat penganiayaan. Begitu pula tindakan fisik berupa pukulan dengan tangan terkepal atau alat yang keras, menendang, membanting atau

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga*, bab 1 Pasal 2.

menyebabkan luka bakar adalah jelas merupakan penganiayaan terlepas dari berat ringannya luka yang timbul.

Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan :

- a. Cedera berat
- b. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- c. Pingsan
- d. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- e. Kehilangan salah satu panca indera
- f. Mendapat cacat
- g. Menderita sakit lumpuh
- h. Terganggunya daya pikir selama minggu lebih
- i. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- j. Kematian korban.

Sedangkan kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan :

- a. Cedera ringan;
- b. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat;

- c. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat⁶

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada isteri agar terpenuhi kebutuhan emosinya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik.

Seperti halnya kekerasan psikis, kekerasan psikis juga terbagi atas dua kategori yaitu kekerasan psikis berat dan kekerasan juga terbagi-bagi berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahandan penghinaan psikis ringan. Kekerasan psikis berat yaitu kekerasan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi social, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masing nya bias mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut :

- a. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
- b. Gangguan stress pasca trauma

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Cet.I; Bandung: PT Refika Aditama 2012), h.16-17

- c. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
- d. Depresi berat atau destruksi diri
- e. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya.
- f. Bunuh diri

3. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi dapat berbentuk suami mengontrol hak keuangan isteri memaksa atau melarang isteri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta tidak member uang belanja, memakai dan menghabiskan uang isteri. Seorang suami dilarang menelantarkan isterinya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada isterinya. Penelantaran berlaku bagi suami yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga isteri berada di bawah kendali suaminya.

Terkait dengan hukum keluarga atau hukum yang berlaku dalam ruang lingkup keluarga di dalam hukum islam merupakan hukum privat atau perdata dalam istilah hukum baratt. Namun, ketika terjadi kekerasan atau penganiayaan, baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dalam hukum islam hal tersebut telah masuk dalam perbuatan jarimah dan pelaku harus dikenakan sanksi pidana. Misalnya kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami yang memfitnah istrinya berzina, padahal tersebut

tidak dilakukan oleh istri, maka dalam keadaan ini dimana suami tidak dapat membuktikan tuduhannya itu, pelaku dikenakan pidana hudud yang diancam dengan hukuman berat, yaitu 80 kali dera. Olehnya itu, bagi korban yang dituduh melakukan zina dapat mengadu kepada yang berwajib tentang tuduhan tersebut.⁷

4. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Perbedaan aspek fisik dan seksual dapat berbentuk suami memaksa istri melakukan sakit, haid, atau sebab lainnya. Suami memaksa melakukan hubungan seksual atau memaksa istri melacur atau hubungan seksual dengan orang lain.

Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah bahkan menyakiti pihak lain. Meski tindak kekerasan, baik bentuk fisik maupun non fisik, keduanya menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan fisik dan mental seseorang, namun perlu diingat bahwa fenomena ini bukanlah semata persoalan keilmuan medis, melainkan melingkupi segala aspek kehidupan. Demikian juga tindak kekerasan bukanlah fenomena criminal semata, melainkan terkait dengan persoalan hukum, etika-moral, kesehatan, serta social budaya, politik, dan latar belakang seseorang. Tindak kekerasan juga bias dialami

⁷Abdul Rahman Kanang, *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminas*, (Makassar : Alauddin University Press 2012), h. 36-43

oleh anak perempuan, sebagaimana dengan anak laki-laki di mana mereka merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan orang dewasa, baik dalam keluarga, sekolah/tempat pendidikan, masyarakat, bahkan badan hukum. Dalam berbagai bentuk tindak kekerasan, anak perempuan lebih banyak menjadi korban, baik fisik maupun non fisik.

D. Lingkup KDRT

Menurut pasal 2 Undang-undang KDRT disebutkan:

1. Lingkup rumah tangga meliputi :

a) Suami, istri, dan anak

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seseorang wanita(istri) adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami dan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetapi dikatakan anak.

b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang di maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau

c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

2. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam rancangan Undang-undang Anti kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh DPR-RI disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah :⁸

- a) Pasangan atau mantan pasangan di dalam maupun diluar perkawinan
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, adopsi dan hubungan adat dan atau agama
- c) Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga yang lain menetap atau tidak disebuah rumah tangga
- d) Orang yang masih tinggal dan atau pernah ftinggal bersama

Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup rumah tangga terdiri dari suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

E. Hak-hak Korban KDRT

Perempuan adalah mahluk “lemah” yang menjadi amanah dari tuhan. Karena itu mereka harus dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 konvensi PBB serta UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam konteks kehidupan social, istri berhak atas kelangsungan hidup serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga*, bab 1 Pasal 2.

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Seseorang istri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, sangat membutuhkan rasa aman. Oleh sebab itu, rasa aman harus diberikan kepada korban antara lain dengan memberdayakan dirinya agar berani mengamankan dirinya sendiri bila memang mendesak.⁹



⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga*, bab 4 Pasal 10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *field research*, *Field research* yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu di Makassar (Lembaga Perlindungan Saksi dan korban).

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.
2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul dalam masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah *field research*, maka data penelitian ini diperoleh dengan bergai cara yaitu:

1. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung¹
2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti²
3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

1. Reduksi Data ialah proses mengubah data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang di inginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan .

Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka / membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik

¹Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Cet v, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.58

²Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, h.54

³Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, h.73

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

1. Sejarah singkat LPSK

Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014. Lahirnya Undang-undang perlindungan saksi dan korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk undang-undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, ataupun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat dari yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Disamping itu, minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap saksi-korban membuat RUU ini harus selalu didesakkan hampir setiap tahun sejak 2001.¹

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan

¹ Agus Takariawan, *Perlindungan saksi dan korban*, (Bandung:Pustaka Reka Cipta,2016),.h.131

bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK merupakan sebuah lembaga mandiri dalam artian lembaga ini independen dimana dia tidak berada dibawah lembaga negara lainnya sehingga tidak memungkinkan intervensi (campur tangan) dari pihak manapun. Sampai dengan saat ini, di Indonesia sendiri sudah begitu banyak lembaga yang bersifat independen berbentuk dan banyak dari lembaga-lembaga tersebut tidak efektif atau mempunyai tugas yang tumpang tindih dengan lainnya. Lembaga- lembaga yang tidak efektif tersebut kini terancam dilikuidasi. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya memberikan suatu pondasi dasar yang kuat untuk pembentukan LPSK agar lembaga ini terhindar dari ketidakefektifan seperti yang sudah menimpa lembaga-lembaga sebelumnya.²

Sebelum diresmikannya Undang-undang perlindungan saksi dan korban, begitu banyak perdebatan yang muncul mengenai kemandirian yang dianut oleh LPSK. Ada pendapat yang mendukung dengan sifat mandiri LPSK dan ada juga yang menentang. Beberapa pendapat dari ahli hukum sebelum disahkannya undang-undang perlindungan saksi dan korban, diantaranya menyebutkan :

- a. LPSK sebagai lembaga yang mandiri;
- b. LPSK mandiri selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian dipindahkan dibawah kepolisian;

² Yulia Rena, *Victimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Bandung: Graha Ilmu, 2010), h.15

- c. LPSK berada dibawah kepolisian;
- d. LPSK berada dibawah kejaksaan.

UU PSK menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam UU ini lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (state organ) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antara tiga cabang kekuasaan tersebut. Sifat independen tercermin dari kepemimpinan yang kolektif, bukan hanya seorang pimpinan. Di dalam UU perlindungan saksi dan korban disebutkan bahwa LPSK bertanggung jawab kepada presiden. Disebutkan pula bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Ruang lingkup perlindungan ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

UU nomor 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun UUPSK tidak merinci tugas dan wewenang dari LPSK tersebut lebih lanjut 20 perumus UU kelihatannya menjabarkan tugas dan wewenang

LPSKH dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam tugas dan kewenangan LPSKH yang tersebar dalam UU No. 13 Tahun 2006, yaitu :

- a. Menerima permohonan saksi dan/atau korban untuk perlindungan (pasal 29)
- b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan/atau korban (pasal 29).
- c. Memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban (pasal 1)
- d. Menghentikan program perlindungan saksi dan/atau korban (pasal 32)
- e. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (pasal 7)
- f. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (pasal 33 dan 34)
- g. Menentukan diperlukan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban (pasal 34)
- h. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (pasal 33).

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana di atur didalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, LPSK melaksanakan :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang perlindungan saksi dan korban
- b. Melaksanakan perlindungan saksi dan korban
- c. Melaksanakan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban
- d. Melaksanakan diseminasi dan hubungan masyarakat
- e. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan pendidikan pelatihan
- f. Melaksanakan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan³
- g. Melaksanakan tugas lain berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.⁴

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPSK memiliki struktur yang terdiri dari pimpinan, anggota dan sekretaris. Anggota LPSK memiliki tanggung jawab atas tugas dan fungsi.:

- a. Perlindungan;
- b. Bantuan;
- c. Kerjasama
- d. Pendidikan dan pelatihan;
- e. Pengawasan;
- f. Pelaporan;
- g. Penelitian dan pengembangan;
- h. Pembentukan hukum;

³.<https://www.kaskus.co.id/thread/55bb2b041a9975845f8b4568/mengenal-lebih-dekat-tentang-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-lpsk/> diakses pada tanggal 23 maret 2017 puul 09.15

i. Diseminasi dan humas.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan LPSK bertanggung jawab kepada Presiden. Implikasi atas hal ini maka presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggung jawab atas kerja-kerja memfasilitasi lembaga ini dibiarkan menjadi lembaga yang dikucilan dan tak terdukung oleh Presiden. Disamping itu UU PSK menugaskan LPSK untuk membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 Tahun. Penugasan ini adalah sebagai fungsi control DPR sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Namun perlu diperhatikan isi dan format seperti apa yang harus dilaporkan kepada DPR maupun presiden. Karena laporan-laporan tersebut jangan sampai membuka informasi yang justru telah ditetapkan sebagai rahasia oleh LPSK dan UU No. 13 Tahun 2006. Disamping sebagai fungsi control dan pengawasan kinerja, DPR juga seharusnya menjadi partner dari LPSK baik sebagai pendukung program LPSK maupun pemberi rekomendasi yang dapat membantu pengembangan program LPSK itu sendiri.⁵

B. Peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kejahatan KDRT

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus kekerasan terhadap Rumah Tangga sudah menjadi kasus yang sudah cukup lama di Makassar, tetapi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Makassar kurang mendapat perhatian khusus oleh pemerintah meskipun sudah ada undang-undang yang

⁵. Muhammad Mustofa, Metodologi penelitian kriminologi, Jakarta; Kencana, 2013, hal. 191

mengatur tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Rumah Tangga. Adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertujuan untuk memberikan perlindungan Saksi dan Korban termasuk KDRT seperti halnya yang terjadi di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada lembaga perlindungan saksi dan korban dalam hal ini diberikan perlindungan keselamatan terhadap diri maupun terhadap keluarga.

Mengingat bahwa terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan oleh adanya ketidak harmonisan hidup dalam keluarga, terjadinya konflik berkepanjangan. Bahkan sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan sering terjadi tindakan tindakan yang melanggar hukum , terjadi kekerasan baik fisik maupun psikologis. Kasus-kasus dalam rumah tangga khususnya terhadap istri yang terjadi pada saat ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Hal ini tentunya mendapatkan perhatian dari semua pihak untuk mengetahui peranan LPSK terhadap korban KDRT yang pada umumnya istri (wanita) yang menjadi korban. Hal ini bisa di maklumi bahwa kaum wanita adalah kaum yang lemah dan posisi yang tentu saja sangat tidak menguntungkan.⁶

Kasus KDRT bukanlah delik aduan melainkan delik biasa, sehingga terjadi penganiayaan, istri melapor kemudian mencabutnya kembali maka kasus tersebut tetap diteruskan di pengadilan sampai jatuh putusan pengadilan atau tidaknya

⁶ Muchsin, "Peranan Putusan Hakim Pada Kekerasan Rumah Tangga", dalam Varia Peradilan Majalah Hukum No.260(Juli 2007), h. 24

sanksi/ ketentuan pidana. Ketika polisi tidak mampu melindungi korban, maka ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebenarnya banyak lembaga-lembaga di Indonesia dalam mendukung pemenuhan hak-hak korban, masalahnya seberapa efektifkah lembaga-lembaga tersebut berjalan. Kalau polisi tidak mampu/menolak memproses kasus maka kita bisa melapor ke LPSK tersebut.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang juga dirancang khusus untuk merespon kebutuhan korban kejahatan KDRT dan anggota keluarganya adalah penetapan yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa :

- a. Korban atau keluarga korban;
- b. Teman korban;
- c. Kepolisian;
- d. Relawan pendamping; atau
- e. Pembimbing rohani

Adapun tentang Korban dan Saksi dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 antara lain :

1. Korban

Korban menurut Undang-undang No.13 Tahun 2006 Bab (1) Pasal (1) ayat 2 adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Kedudukan hubungan antara para pelaku kejahatan dengan saksi atau korban dalam suatu peristiwa pidana, dalam sejarah kriminalitas di dunia menunjukkan salah satu subyek hukum yang

terabaikan oleh para pakar atau ilmuwan, maupun masyarakat dalam menanggapi terjadinya suatu peristiwa pidana. Menurut Arif Gosita tentang masalah korban kejahatan yang di maksud dengan korban, adalah mereka menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban disini dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah⁷.

Di katakan, tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan. Jadi jelas bahwa, Pihak korban sebagai partisipan utama memainkan peranan penting. Bahkan setelah kejahatan di lakukan. Dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman bagi pihak pelaku, dapat juga terjadi suatu kejahatan yang di lakukan oleh pihak korban apabila di rasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban.

Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang di batasi situasi dan kondisi tertentu. Dalam kenyataan,tidak mudah membedakan secara tajam setiap peranan yang dimainkan pihak korban.⁸

Dalam hubungan ini situasi dan kondisi pihak korban serta pihak pelaku adalah sedemikian rupa, sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi

⁷ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan,(*kumpulan karangan*), Jakarta:Akademika Pressindo,1993,hal.63

⁸ Arif Gosita,*Masalah Korban Kejahatan*,(*Kumpulan Karangan*),Jakarta:Akademika Pressindo,1985,hal.82

tertentu (bahkan kadang – kadang melegitimasi tindakan jahatnya atas motivasi dan rasionalisasi tersebut).

2. Peranan Saksi

Saksi adalah yang mengemban dan memberikan kesaksian karena dia menyaksikan apa yang tidak di saksikan oleh orang lain. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Bab 1 Pasal (1) ayat (1), saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Perlindungan saksi dan korban menurut pasal 3 Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi berasaskan pada :⁹

- a. Perlindungan Harkat dan Martabat Manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif;dan
- e. kepastian Hukum.

Si saksi yang mengetahui akan terjadinya,atau melihat berlangsungnya pembuatan korban, sikap dan tindakannya dapat mencegah terjadinya korban

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bab1 Pasal 6.*

perlu mendapat perhatian. Sikap dan tindakannya berdiam diri sebetulnya sudah dapat dituntut berdasarkan lembaga omnisidelik pada peristiwa tertentu.

Tetapi ada hal tertentu yang membuat si saksi tidak bertindak mencegah terjadinya si korban antara lain si saksi takut adanya akibat yang merugikan dirinya atau pelapornya tidak mendapat perhatian, bahkan ada kemungkinan ia dapat disangka dirinya terlibat dan mendapat kesulitan dalam peradilan. yang menjadi masalah di sini adalah menciptakan suasana agar para saksi mau berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan terjadinya korban dengan adanya jaminan terhadap keamanan dirinya baik dari pihak si pembuat korban maupun dari penguasa.¹⁰

Si saksi ini dapat berupa individu– individu, masyarakat, penguasa negara. Pembiaran terjadinya dan kelangsungan penyimpangan dalam masyarakat, dalam negara dan di dunia akan membawa akibat yang negatif akhirnya, secara langsung atau tidak langsung pada para saksi sendiri. oleh sebab itu perlu adanya koperasi dan koordinasi dalam mencegah penyimpangan – penyimpangan yang besar maupun yang kecil antara saksi lokal, nasional dan internasional. penimbunan terjadinya korban lebih banyak lagi harus dicegah sedapat mungkin.

Berdasarkan uraian di atas, Perspektif Hukum Pidana Islam Sebagaimana penjelasan dalam Q.S An-Nisa/4 Ayat 34:

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1983), h.50

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹¹

Tafsirnya :

Allah swt berfirman bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin, penguasa, kepada dan guru pendidik bagi kaum wanita, karena kaum laki-laki mempunyai kelebihan di atas kaum wanita yang dibuktikan lelaki, Demikian pula pemimpin negara dan bangsa dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar berada ditangan laki-laki.

Selain kelebihan jasmani dan mental pihak laki-laki di atas wanita-wanita yang menjadi pembawaan fitrah, juga karena pihak laki-laki berkewajiban

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Fajar Mulya,2009), h.84

menafkahkan hartanya untuk kepentingan hidup pihak-pihak wanita serta untuk memenuhi kebutuhan lain seperti mas kawin dan bban-beban keuangan yang diwajibkan oleh Allah kepadanya menurut Al-quran dan Sunnah Nabi-Nya SAW. Maka dengan kelebihan-kelebihan itu patutlah kalau pihak pria menjadi pemimpin dan wali di atas pihak wanita, bagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 228.

Allah berfirman selanjutnya bahwa perempuan-perempuan yang saleh, ialah yang bertaat kepada suami-suaminya, memelihara dirinya dan harta suaminya di balik pembelakangan sang suami, oleh karena Allah memelihara mereka.

Allah berfirman bila kamu mengkhawatirkan *nusyuz* dari pihak istri istrimu maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah dirimu di tempat tidur mereka jika nasihatmu tidak diacuhkan dan janganlah kamu mengajak bicara tanpa memutus pernikahanmu dengan mereka dan jika semuanya ini tidak mempan, maka bolehlah kamu memukul mereka dengan pukulan yang tidak merusak bagian-bagian tubuhnya terutama wajah dan kepalanya.

Allah SWT berfirman dalam penutup ayat ini:”Dan jika mereka telah mentaati kamu dalam segala apa yang kamu kehendaki dari mereka sepanjang yang diperbolehkan oleh Allah, maka tidak ada jalan bagimu untuk menyusahkan mereka dengan memisahkan diri dari mereka atau memukul mereka. Ketahuilah bahwa Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar yang akan

memberi balasan terhadap pria-pria yang menganiaya para wanita dan berlaku kejam terhadap istri-istri mereka tanpa alasan dan sebab yang benar.¹²

Tidak ada satu pun agama seperti Islam yang menyadari hak orang-orang yang dizalimi (korban) dan berbuat untuk melindungi mereka dari kesewenang-wenangan pelaku tindak pidana tanpa bisa menutup apapun. Hak hidup, hak milik, hak keamanan, hak kehormatan, hak keturunan, hal jiwa dianggap sebagai urgensi dalam pandangan syariat Islam, syariat diturunkan oleh Allah SWT untuk melindungi dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Bahkan Allah SWT telah menetapkan hukuman untuk memberikan dan jaminan perlindungan agar tidak terjadi pelanggaran di kalangan umat manusia di muka bumi ini.

Hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dimiliki manusia menjalankan proses kehidupan. Perlindungan atas hak ini diberikan dalam segala yang berkaitan dengan usaha manusia untuk membangun kehidupan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan dilingkungan sekitarnya. Hak hidup diberikan kepada semua umat manusia. Hak untuk hidup merupakan salah satu hak yang sangat dilindungi dalam ajaran Islam. Berbagai ajaran yang terkandung dalam Al Qur'an dan As Sunah menegaskan dukungan dan jaminan atas hak hidup manusia, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang mengatur tentang larangan bagi sesama manusia untuk merugikan salah satu pihak.

Nilai-nilai kemanusiaan dipertahankan sangat ketat dalam pelaksanaan hukum pidana Islam. Pemberlakuan hukuman hanya berlaku bagi orang yang

¹² H. Salim Bahreisy dkk, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2003), h. 387-392.

terbukti bersalah. Pihak keluarga sebagai ahli waris dari korban tidak boleh memberikan hukuman yang semena-mena dan harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan alasan kemanusiaan inilah maka hukuman bisa terhapus jika pihak keluarga korban memaafkan pelaku tindak pidana walaupun pelaku tindak pidana tetap mendapat hukuman pengganti dari hukuman pokok. Hukuman pidana yang dijatuhkan semata-mata ditentukan oleh Negara melalui undang-undang terlepas dari kehendak korban / ahli warisnya dan jenis sanksinya.

Untuk mengetahui jumlah kasus yang masuk di Lembaga Perlindungan saksi dan korban penulis melakukan penelitian di Kantor lembaga perlindungan saksi dan korban dan telah menguraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Jumlah kasus yang masuk di LPSK Makassar Tahun 2014-2017

Tahun	Kasus Yang Masuk LPSK Makassar
2014	4
2015	10
2016	5
2017	17
JUMLAH	20

Sumber Data: Diambil dari Kantor LPSK pada Tahun 2014-2017

Berdasarkan tabel tersebut jumlah Kasus yang masuk di LPSK Makassar selama 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2017 terdapat 20 kasus. Meskipun terhitung kecil, namun tingkat kerugian dan kriminalitas dari tindak pidana ini tidak berkurang sama sekali. segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam

rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dan dari hasil penelitian tersebut penulis juga mendapatkan Keterangan data berupa tersangka dan korban kasus kekerasan seksual dalam keluarga tahun 2014.

Berdasarkan data yang Penulis dapatkan di LPSK maka ditemukan adanya sejumlah kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh LPSK dan untuk mengetahuinya penulis telah menguraikannya dalam bentuk tabel data sebagai berikut :

Jumlah Kasus KDRT yang melapor di LPSK pada Bulan Januari-April 2017

Bulan	Tindak Pidana kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT)
Januari	7
Februari	5
Maret	3
April	2
Jumlah	17

Sumber Data : Staf lembaga Kantor LPSK pada Bulan Januari-April

Tahun 2017

Berdasarkan tabel tersebut jumlah jenis kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh LPSK selama bulan Januari hingga April tahun 2017 sebanyak 17 kasus. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan

perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan.

Adapun bentuk kekerasan yang dilaporkan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pada bulan Januari-April pada Tahun 2017 Yaitu :

1. Seorang Ibu Rumah Tangga yang bernama Ramlah. Menurut beliau faktor terjadinya KDRT adalah faktor ekonomi. Dimana pada saat ini kebutuhan pokok semakin mahal dan suaminya tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, didalam rumah tangga beliau sering terjadi pertengkaran dengan suaminya. Dimana didalam pertengkaran tersebut suami beliau sering mengalami emosional sehingga terjadilah kekerasan terhadap istrinya.dengan akhirnya Ibu Ramlah melaporkan kasusnya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan.¹³
2. Seorang Ibu Rumah Tangga yang bernama Astuti menurut beliau faktor terjadinya KDRT adalah faktor Kekerasan fisik yang mengakibatkan muka dan bibirnya memar semua. Suami Ibu Astuti ini sudah dilaporkan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan sudah dijerat dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan Pasal 44 ayat 1 UU PKDRT dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak 15 Juta Rupiah atau Pasal 44 ayat (1) di lakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

¹³ Ramlah, "Kekerasan Ekonomi", *Tempo Online*, 3-4, diakses Pada tanggal 5 Juni 2017 Pukul 11.18

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Respon positif dari LPSK akan segera menindak lanjuti laporan Ibu Astuti dengan melakukan penangkapan terhadap suaminya.¹⁴

3. Seorang Ibu Rumah Tangga yang bernama Lilis Indriani telah melaporkan suaminya ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk mendapatkan bantuan karena suaminya telah menganiaya hingga gegar otak dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Dan LPSK sudah menindak lanjuti dan melaporkannya ke polisi dan menurut Kepolisian suaminya telah melanggar UU Kekerasan Rumah Tangga.¹⁵

4. Seorang Ibu Rumah Tangga yang bernama Bondeng umur 29 Tahun asal kota Makassar melaporkan suaminya ke LPSK untuk mendapatkan bantuan aksi pelaporan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) itu di picu aksi suaminya menghajarnya hingga babak belur. Mengaku suaminya emosi karena setelah mengetahui sang istri ternyata mengaku sebagai seorang janda kepada teman chattingnya di Facebook dan LPSK sudah menindak lanjuti dan menyerahkannya ke Polisian.¹⁶

¹⁴ Astuti, "Kekerasan Ekonomi", *Tempo Online*, 3-4, diakses Pada tanggal 5 Juni 2017 Pukul 11.35

¹⁵ Lilis Indriani, "Kekerasan Ekonomi", *Tempo Online*, 3-4, diakses Pada tanggal 6 Juni 2017 Pukul 10.30

¹⁶ Bondeng, "Warga yang Mengalami KDRT, wawancara, Sabtu Tanggal 17 Juni 2017 di Makassar.

Untuk mendapat perlindungan dari LPSK Adapun syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 UU PSK yaitu:

- a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. Tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- dan
- d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.¹⁷

Pasal 28 ini memberikan penjelasan bahwa setiap saksi dan/atau korban bisa menerima perlindungan hukum dari LPSK jika memenuhi syarat-syarat di atas, yaitu

- a. setiap keterangan yang diberikan oleh Saksi dan/atau Korban dalam suatu sidang di pengadilan haruslah bersifat penting. Selain itu juga adanya ancaman dari luar yang mungkin membahayakan nyawa para saksi dan/atau korban serta membahayakan keluarganya.

C. Upaya yang ditempuh oleh LPSK dalam melindungi saksi dan Korban terhadap kejahatan KDRT

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Rumah Tangga, menegaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap warga perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, bab 4 Pasal 28.

psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk secara melawan hukum dalam lingkup Rumah Tangga.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁸

Salah satu kewajiban pemerintah terkait peraturan perundangan yang telah diberlakukan adalah melakukan sosialisasi peraturan tersebut sedemikian rupa sehingga di ketahui dan dipahami oleh warga masyarakat khususnya Kota Makassar. Sebagai bagian dari pemerintah telah berupaya melakukan sosialisasi Undang-Undang PKDRT dalam bentuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, kegiatan tersebut di lakukan oleh Badan khusus yang berkompeten dengan bidangnya yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan.

Hanya saja masih terdapat persoalan dalam hal sosialisasi tersebut, di kota Makassar saja sosialisasi hanya di lakukan terhadap organisasi perempuan, kantor-kantor tertentu dan lain-lain. Hal mana yang di ikuti oleh pihak Badan Pemberdayaan Perempuan sendiri, karena keterbatasan dana yang di sediakan untuk melakukan sosialisasi tersebut. Di samping kurangnya jangkauan

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Rumah Tangga*, Bab 1 Pasal 1

masyarakat yang di berikan sosialisasi kekurangan juga terjadi dalam hal pemberian materi atau pemahaman mendalam tentang undang-undang tersebut.¹⁹

Perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Indonesia pada saat ini tidak maksimal karena disebabkan oleh beberapa kelemahan seperti tindak adanya perlindungan terhadap penganiayaan KDRT. Hak saksi sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak dijamin oleh aparat penegak hukum, Hal ini dapat dilihat perumusan tentang hak saksi dan korban untuk memperoleh penggantian biaya pada saat dia di panggil disetiap tingkat pemeriksaan dimana dalam penerapannya hal ini tidak pernah di laksanakan. Tidak detailnya ketentuan tentang bentuk dan tata cara perlindungan yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan tidak maksimalnya penjamin keselamatan saksi dan korban (termasuk keluarga).

Hal- hal yang harus menjadi pokok perhatian untuk suksesnya perlindungan saksi dan korban di Indonesia adalah faktor perundang-undangan, pemerintah harus dengan segera membuat perubahan terhadap UU perlindungan saksi dan korban yang bertujuan melengkapi kekurangan yang ada di dalam ketentuannya yang ada dalam ketentuannya atau membuat peraturan pemerintah yang mengatur secara detail tentang perlindungan saksi dan korban. Hal ini bertujuan untuk memudahkan LPSK dalam melaksanakan tugasnya dan memperluas cakupan saksi dan korban yang berhak atas perlindungan. Faktor-faktor LPS dan lembaga lainnya. Sebagai sebuah lembaga independen yang belum

¹⁹Guse Prayudi *Berbagi Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta:2008),h.25

lama, LPSK harus mampu berkordinasi dengan lembaga lainnya yang sudah ada sebelumnya. LPSK juga harus menjadi sebuah lembaga baru yang mampu menerima kritik dan saran dari lembaga lain atau warga masyarakat yang bersifat membangun.

Adapun langkah-langkah dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Makassar berdasarkan hasil wawancara dengan Kamri Ahmad. selaku staf dari Lembaga Perlindungan saksi dan Korban antara lain :

1. Melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian.
2. Memberikan perlindungan khusus, seperti memberikan perlindungan kesehatan, memberikan jaminan kesejahteraan, memberikan fasilitas.²⁰

Sehingga dapat diuraikan penjelasan dibawah ini

1. Kerjasama dengan polisi

Perlindungan hak-hak saksi dan korban sudah menjad unsur mutlak yang dilakukan polisi dalam penegaan hukum. Bahwa masih banyaknya saksi dan korban yang cenderung hanya ada dalam pikirannya bahwa ancaman yang nyata akan ketakutan adanya ancaman sering kali di jadikan alasan yang cukup untuk menghalangi seseorang untuk memberikan kesaksiannya kepada polisi namun banyak korban dan saksi dari kejahatan tersebut. Setiap anggota polri dalam melaksanakan tugasnya sesuai UUD 1945 hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk mendapat kemudahan

²⁰ Kamri ahmad , Kepala Staf Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *wawancara*, Rabu Tanggal 22 Maret 2017di Makassar.

dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta hak atas aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Terkait dengan upaya perlindungan saksi dan korban setiap petugas polisi dilarang menghalangi proses peradilan dan atau menutup-nutupi kejahatan dalam hal ini polisi juga harus senantiasa memperhatikan Undang-undang yang berlaku dengan demikian kerja sama antara polisi dan LPSK dalam pemenuhan hak saksi dan korban menjadi sebuah kebutuhan diharapkan mampu memberi perlindungan hukum dan keamanan pada tiap orang agar dapat membantu mengungkap tindak pidana kejahatan.²¹

2. Memberikan perlindungan khusus

Keterangan yang diberikan korban/saksi memainkan peran kunci bagi keberhasilan suatu tuntutan peradilan, sehingga para pelaku kejahatan sering mencoba melakukan upaya-upaya khusus, termasuk memberi janji-janji muluk ataupun intimidasi langsung, guna mencegah korban memberikan kesaksiannya. Perlindungan bagi saksi dan korban harus didasarkan pada undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional. Istilah perlindungan adalah bentuk perbuatan untuk memberikan tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Pengertian perlindungan ini hampir sama pengertiannya dengan perlindungan dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa

²¹. Muh.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.51

perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh²² aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Secara spesifik tujuan dari pemberian perlindungan khusus bagi saksi dan korban adalah untuk :

1. Mendorong korban/saksi kekerasan untuk berperan serta dalam proses investigasi dan penuntutan hukum melalui adanya peraturan prosedur yang menciptakan rasa aman secara fisik dan psikologis
2. Mengurangi trauma yang dialami korban/saksi
3. Melindungi korban/saksi dari kekerasan, serangan pembalasan ataupun stigmatisasi²³
4. Menghasilkan penghukuman bagi yang bersalah melakukan kejahatan.

Semua upaya ini dilakukan tanpa mengurangi peluang yang wajar bagi pihak tertuduh untuk melakukan pembelaan diri. Perlindungan bagi saksi dan korban yang bersifat menyeluruh harus mencakup lima tahapan yang dilalui saksi dan korban yaitu tahap pertolongan pertama(gawat darurat) ketika peristiwa baru saja terjadi, tahap investigasi, tahap pra persidangan, tahap persidangan serta tahap pasca persidangan (setelah putusan akhir). Perlindungan bagi saksi dan korban

²². <http://www/ngah> Darwis perlindungan saksi dan korban diakses pada tanggal 31 maret 2017 pukul 01.03.

²³.Jantunkanakbetawi.wordpress.com,victimologi diakses pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 21.15

merupakan tanggung jawab perangkat penegak hukum/pemerintah maupun masyarakat. Prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban mencakup.:

- a. Keamanan saksi/korban harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan langkah yang diambil oleh pihak yang menangani kasus
- b. Korban adalah pengambil keputusan akhir menyangkut tingkat dan lingkup keterlibatannya dalam keseriusan proses penanganan kasusnya
- c. Korban wajib mendapatkan informasi yang benar dan lengkap agar dapat membuat pilihan terbaik bagi dirinya
- d. Tidak dibenarkan untuk mempersalahkan saksi dan korban atas kejahatan yang dialaminya.
- e. Sistem perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban harus bersifat komprehensif atau menyeluruh
- f. Langkah-langkah perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban harus saling terkordinasi satu sama lainnya baik yang dijalankan oleh penegak hukum, organisasi masyarakat, institusi kesehatan maupun lembaga publik lainnya.
- g. Perlindungan saksi juga berlaku bagi saksi yang meringankan guna menjamin prinsip keadilan bagi pihak tertuduh.²⁴

Pemberian hak-hak kepada saksi dan korban dapat berupa :

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, bab1 Pasal 6.

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana
- b. Hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum
- d. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan
- e. Hak untuk mendapatkan penterjemah
- f. Hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat
- g. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus

Bentuk pendampingan kasus KDRT oleh LPSK menurut Bapak Khamri SH.M.Hum Seperti diketahui, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“KDRT”) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan undang-undang tersebut telah mengatur sejumlah delik pidana yang dapat terjadi dalam tindakan KDRT. Dengan demikian, sinkronisasi dalam hal ini adalah terkait, setiap saksi dan korban dalam tindak pidana KDRT, berhak memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam UU 31/2014, dan tentunya berhak mendapat perlindungan dari LPSK, terutama saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang menghadapi situasi yang sangat mengancam jiwanya

Pemberian perlindungan untuk sementara dalam hal ini kelihatanya dipusatkan pada eksistensi kepolisian, karena sebagian besar dari ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian

terdiri dari keseluruhan yang khusus mengatur ketentuan perlindungan. Jadi hampir separuh dari ketentuan Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan terhadap korban. Di samping memberikan perlindungan kepada korban juga memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan lainnya dalam kaitannya dengan upaya-upaya pencegahan (*preventive*), maupun penindakan (*repressive*), tujuannya antara lain agar korban terhindar dari pengaruh atau tekanan yang lebih berat, baik dari pihak suami atau pihak-pihak lainnya sehingga tidak bebas dalam memberikan keterangan.²⁵

Di samping kepolisian dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Demikian juga ada beberapa perlindungan dalam rangka pelayanan yang harus diberikan oleh lembaga-lembaga lainnya seperti pelayanan kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping advokat, dan rohaniawan, dimana menurut penulis masih memerlukan petunjuk atau mekanisme yang tegas dan sebaiknya disusun secara terpadu, sehingga terlihat secara jelas:

1. kapan masing-masing harus bertindak,
2. bagaimana batasan-batasan tindakan yang harus diberikan, sehingga perasaan atau penderitaan korban tidak bertambah parah baik fisik maupun psikis,
3. kapan suatu korban ditangani secara bersama-sama, dan lain lain.

²⁵ Kamri ahmad , Kepala Staf Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, wawancara, Senin Tanggal 29 Mei 2017 di Makassar

Dalam kaitan pemberian perlindungan yang lebih intensip baik kepada korban dan atau anggota keluarga lainnya, dan bilamana dirasakan sangat perlu maka perlindungan sementara yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada korban, dapat ditingkatkan menjadi perintah perlindungan dalam bentuk penetapan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU KDRT, yang dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban,
- b. teman korban,
- c. kepolisian,
- d. relawan pendamping, dan
- e. pembimbing rohani. Perintah perlindungan dalam bentuk penetapan pengadilan dapat diberikan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan penetapan pengadilan.²⁶

Sebagaimana yang penulis sebutkan di atas, bahwa yang paling banyak bersentuhan dengan UU PKDRT ini pihak kepolisian, hal itu merupakan refleksi dari tugas-tugas kepolisian yang bersifat universal yaitu melakukan perlindungan (*protections*), melakukan pelayanan kepada masyarakat, (*services*), dan menegakkan hukum serta memelihara tata tertib (*law enforcement and maintain law and order*).

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, bab1 Pasal 6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hak peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kejahatan KDRT yaitu apabila terdapat korban kekerasan dalam Rumah Tangga melaporkan ke LPSK kemudian LPSK menindak lanjuti laporan tersebut dan memperhatikan apakah laporan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan, kemudian dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
2. Upaya yang ditempuh oleh LPSK dalam melindungi saksi dan Korban terhadap kejahatan KDRT yaitu Melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dan Memberikan perlindungan khusus, seperti memberikan perlindungan kesehatan, memberikan jaminan kesejahteraan, dan memberikan fasilitas.

B. Implementasi penelitian

1. Perlunya didirikan LPSK di setiap Provinsi di Indonesia sehingga membuat saksi dan korban mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK menjadi mudah selain itu dengan keberadaan LPSK pada setiap provinsi membuat masyarakat mengetahui bahwa telah adanya sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak yang

seharusnya didapatkan oleh saksi ataupun lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

2. LPSK dalam memberikan perlindungan harus bekerja dengan Maksimal agar memberikan perlindungan yang terbaik terhadap saksi maupun korban dalam memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh saksi ataupun lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ash-Shiddiqi, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975
- Anisa, Diana Roshda. *Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : Universitas sebelas maret, 2012
- Bahreisy, Salim dkk, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2003
- Dirjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan Karangan)*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.
- _____ *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1985.
- _____ *Viktimolog dan KUHP*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1993
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cet.I; Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Kanang, Abdul Rahman. *Perempuan tanpa Kekerasan dan Deskriminasi*. Alauddin University Press : Makassar, 2012
- Kasim, Ifdal. *Mereka yang menjadi korban hak korban atau restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi*. Jakarta : Pustaka pelajar Yogyakarta, 2002
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir perkata*, Bandung: Jabal, 2010
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Fajar Mulya, 2009
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Panitensir Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Mustofa, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Muchsin, "Peranan Putusan Hakim Pada Kekerasan Rumah Tangga", dalam Varia Peradilan Majalah Hukum No.260 Juli 2007

- Prayudi, Guse *Berbagi Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid, 2008
- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi/ (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung : PT. Alumni, 2006.
- Rena, Yulia. *Victimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Bandung : Graha Ilmu, 2010.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- Syamsuddin, Rahman. *Merajut Hukum Indonesia*, Jakarta : mitra wacana media, 2014
- Sahetapy, J.E. *Viktimologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis viktimologi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Simanjuntak, B. *Pengantar kriminologi dan patologi sosial* . Bandung : Tarsito, 1981
- Takariawan, Agus. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung : Pustaka Reka Cipta 2016
- Undang - Undang RI No.13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Undang - Undang RI No.13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2007.
- Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*
- Waluyo, Bambang , *Viktimologi Perlindungan korban dan saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004
- Widiyanti, Ninik, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Waskita Yulius, Ninik, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Zaidan, Muh Ali, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

B. Sumber Internet

Jurnal Hukum “Efektivitas UU Nomor 13 Tahun 2006 Jaminan perlindungan saksi” [http://www.jurnal.hukum.com/perindungan saksi dan korban dalam kejahatan KDRT /\(30 maret 2017\)](http://www.jurnal.hukum.com/perindungan_saksi_dan_korban_dalam_kejahatan_KDRT_/(30_maret_2017))

Jurnal Ilmu Hukum “Kekerasan terhadap perempuan dan hukum pidana dalam jurnal perempuan”[http://annekasaldanmardhiah.blogspot.co.id/\(23 Maret 2017\)](http://annekasaldanmardhiah.blogspot.co.id/(23_Maret_2017))

[http://www/ngah Darwis Perlindungan Saksi dan Korban \(31 Maret 2017\)](http://www/ngah.Darwis_Perlindungan_Saksi_dan_Korban_(31_Maret_2017))

Jurnal Hukum “Perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga” [http://KDRT-BambangDwiBaskoro.pdf/\(22 April 2017\)](http://KDRT-BambangDwiBaskoro.pdf/(22_April_2017))

Ramlah,”Kekerasan Ekonomi”,*Tempo Online* (5 Juni 2017)

Astuti,”Kekerasan Ekonomi”,*Tempo Online* (5 Juni 2017)

Lilis Indriani,”Kekerasan Ekonomi”,*Tempo Online*, (6 Juni 2017)

Jurnal Hukum “[http://www Pengertian Tindak Pidana KDRT](http://www.Pengertian_Tindak_Pidana_KDRT) (21 April 2017)

[http://www Pengertian Tindak Pidana KDRT hal.1-2\(5 Juni 2017\)](http://www.Pengertian_Tindak_Pidana_KDRT_hal.1-2(5_Juni_2017))

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hasriana lahir di Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 2 Mei 1995 anak Kedua dari dua bersauda Bapak Azikin Razak (Bekerja di Kantor Camat Sinjai Selatan Sebagai Bendahara Kantor) dan Ibu Hamirah (Ibu Rumah Tangga). Pendidikan formal di Mulai di SDN 203 Bola Desa Bulukamase Kec.Sinjai Selatan dan lulus pada tahun 2009, Melanjutkan ke bangku SMPN 3 Sinjai Selatan dan lulus pada tahun 2011, setelah itu penyusun mendaftarkan dirinya ke SMAN 1 Sinjai Tengah dinyatakan lulus pada tahun 2013, tidak sampai disitu penyusun melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin jurusan Ilmu Hukum hingga saat ini. Beberapa organisasi dan Kegiatan yang diikuti selama menempuh pendidikan diantaranya Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum Periode 2013-2014, di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Periode 2014-2015, Pengurus Organisasi Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) Uin Alauddin Makassar, Pengurus Organisasi Kerukunan Keluarga Mahasiswa Sinjai (KKMS) Komisariat Uin Alauddin Makassar.

“TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN YANG DI LAKUKAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”

Insid kejahatan apa?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh :

HASRIANA
NIM.10500113002

- pidana korban (dilar, slam).

Pembimbing
1. Rahman Syamsuddin ST.MU
2. DR. Hamzah Hasani MM;
27/1/16

RAHMAN SYAMSUDDIN
NIP 19821207 200901 1 010

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016

① - teramena → salah tangkap bkn dia pr lalu.
Prar 1psk..

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Kamri Ahmad,SH.,M.Hum
Jabatan : Kepala Staf LPSK
Pekerjaan : Dosen UMI (Universitas Muslim Indonesia)
Instansi : LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

Menyatakan bahwa benar saudari Hasriana telah melaksanakan penelitian pada Tanggal 22 Maret 2017 di Instansi Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) di Makassar.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Makassar, 22 Maret 2017



Dr. Kamri Ahmad,SH.,M.Hum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 790 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Hasriana
N I M : 10500113002
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Jumat, 26 Mei 2017
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Perlindungan saksi Dan Korban Terhadap Kejahatan KDRT Di Makassar"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H, M.H
Penguji I : Ashabul Kahfi, M.H
Penguji : St. Nurjannah, M.H
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/FNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 19 Mei 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembususan
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

Nomor : *U.S./SI.1/PP.00.9/AL/2017*
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 19 Mei 2017

Kepada

- Ytfr.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
 2. Istiqamah, S.H, M.H (Sekertaris)
 3. Ashabul Kahfi, M.H (Penguji I)
 4. St. Nurjannah, M.H (Penguji II)
 5. Rahman Syamsuddin, S.H, M.H (Pembimbing I)
 6. Dr. Hamsah hasan, M, H.I (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Hasrianah
N I M : 10500113002
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Mei 2017
Waktu : Pukul 15.00-16.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 490 Tahun 2016
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : **1. Rahman Syamsuddin, SH.,MH**
2. Dr. Hamzah Hasan, MH

Sebagai pembimbing mahasiswa :

- Nama : **Hasriana**
- N I M : **10500113002**
- Fakultas/Jurusan : **Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum**
- Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Perlindungan Korban Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban".**
- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

Pada tanggal : 20 September 2016

Dekan;

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)
Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : 1220 SI.1/PP.00.9/01/2017
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata 16 Maret 2017

Kepada
Yth. **Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Di-
Kota Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Hasriana
N I M : 10500113002
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Kota Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.Adapun Judul Skripsi yaitu :

"Tinjauan Hukum Perlindungan Korban Kejahatan Terhadap Penganiayaan yang dilakukan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban"

Dengan dosen pembimbing:

1. **Rahman Syamsuddin., S.H., M.H**
2. **Drs. Hamzah Hasan, M.Hi**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Anak Kota Makassar, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2017 s/d 20 April 2017.

Demikian harapan kami dan terimakasih.
Wassalamu 'AlaikumWr.Wb.



Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa